

ABSTRAK

Pelabuhan Kamal memiliki area yang cukup luas dan potensial untuk dimanfaatkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas akad muamalah. Salah satu bentuk akad yang lazim diterapkan di lokasi tersebut adalah akad *ijarah* atau sewa-menyewa. Dalam praktiknya, mekanisme penyewaan ini melibatkan pelaku UMKM dan perantara, baik yang berupa calo maupun pihak dari ASDP. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi akad sewa-menyewa yang dijalankan oleh pelaku UMKM dengan bantuan jasa perantara (calo) dalam tinjauan fiqh muamalah di wilayah Pelabuhan Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode riset lapangan yang memiliki karakter deskriptif. Informasi diperoleh dari dua jenis sumber, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun langsung oleh peneliti melalui wawancara tatap muka dengan para informan, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan peringkasan (reduksi) data, penyajian informasi, serta penarikan simpulan atau verifikasi.

Temuan riset mengindikasikan bahwa pelaksanaan akad sewa-menyewa di kawasan Pelabuhan Kamal telah selaras dengan kaidah-kaidah fiqh muamalah. Jenis akad yang diterapkan ialah akad *ijarah*, yang dilangsungkan melalui komunikasi lisan secara langsung, disertai pula dengan penyusunan kesepakatan tertulis yang terstruktur. Nilai kejujuran dan asas keadilan menjadi fondasi utama dalam proses perjanjian antara kedua pihak. Oleh karena itu, implementasi akad *ijarah* di pelabuhan tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah, tetapi juga mencerminkan harmonisasi dengan nilai-nilai keislaman yang dijunjung oleh masyarakat setempat.

Kata kunci : Akad sewa menyewa, hukum Islam, Fiqh muamalah, calo, UMKM.

ABSTRACT

Kamal Port encompasses an extensive land area that presents opportunities for public utilization through various forms of economic (muamalah) agreements. Among the most prevalent contracts employed is the lease arrangement. The leasing activities in this port predominantly involve micro, small, and medium enterprises (MSMEs), facilitated either by intermediaries or the Indonesian Ferry Services (ASDP). This research seeks to investigate the leasing practices of commercial spaces for MSMEs conducted via intermediaries, analyzed through the lens of Islamic commercial law (*fiqh muamalah*), with a focus on Kamal Port situated in Kamal District, Bangkalan Regency.

The approach adopted in this study is a qualitative field method, utilizing descriptive field research techniques for data collection. The research draws upon both primary and secondary data sources. Primary data were acquired directly by the researcher through face-to-face interviews with key informants, while secondary data were sourced from relevant literature, including books, academic journals, and scholarly articles. The analytical process involves stages of data condensation, information display, and conclusion drawing or verification.

The study reveals that leasing activities at Kamal Port are consistent with the tenets of Islamic commercial law (*fiqh muamalah*). The leasing agreement utilized is an *ijarah* contract, executed both verbally in face-to-face interactions and through a documented, organized arrangement. The principles of integrity and equity underpin the mutual understanding between the involved parties. Consequently, the application of the *ijarah* contract at Kamal Port aligns not only with the doctrines of *fiqh muamalah* but also with the Islamic ethical standards upheld by the local community.

Keywords : Lease contract, Islamic law, *Fiqh muamalah*, Broker, MSMEs.